

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Besaran perkembangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber penerimaan dan pengeluaran yang berbeda dimana kondisi posisi wilayah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan berpengaruh terhadap implementasi pelaksanaan desentralisasi di tiap daerah. Belum meratanya keuangan tiap daerah di Indonesia mendorong terhambatnya pembangunan yang merata, oleh karena itu pemerintah pusat berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan dibuatnya kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan di tiap daerah untuk dapat mengatasi kesenjangan fiskal (Amelia & Periansya, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan utama dari belanja modal adalah untuk mendukung penyediaan aset tetap dan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset yang tidak hanya berfungsi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Belanja modal merupakan komponen penting dalam anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran investasi jangka panjang. Investasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, pengembangan teknologi, serta pengadaan fasilitas publik lainnya. Dalam konteks pengelolaan

keuangan daerah, belanja modal memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan yang efektif dari belanja modal sangat bergantung pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui sejumlah indikator keuangan (Mardiasmo, 2009).

Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pengalokasian belanja modal yang baik merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Rasio belanja modal merupakan rasio yang mempresentasikan besaran belanja modal terhadap total belanja daerah (yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) dalam anggaran pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur atau investasi aset tetap yang akan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan utama dari rasio belanja modal adalah untuk menilai prioritas belanja pemerintah daerah, menjamin keberlanjutan pembangunan, dan mengukur seberapa baik manajemen keuangan dalam meningkatkan standar pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung**

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Lampung Barat	12,90 %	17,71%	11,89%
2	Tanggamus	10,60%	15,08%	8,49%
3	Lampung Selatan	11,73%	16,50%	11,83%
4	Lampung Timur	10,41%	9,04%	9,01%
5	Lampung Tengah	19,82%	15,22%	12,47%
6	Lampung Utara	7,19%	16,21%	9,88%
7	Way Kanan	9,08%	8,40%	8,00%
8	Tulang Bawang	9,41%	11,16%	13,42%
9	Pesawaran	11,28%	14,00%	13,09%
10	Pringsewu	17,26%	12,49%	9,96%
11	Mesuji	16,07%	15,68%	14,64%
12	Tulang Bawang Barat	25,98%	17,65%	13,24%
13	Pesisir Barat	25,35%	28,26%	20,28%
14	Kota Bandar Lampung	19,86%	18,68%	14,17%
15	Kota Metro	13,82%	10,05%	10,65%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Pada tabel rasio belanja modal, terlihat bahwa presentase belanja modal dari setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi selama periode 2021-2023. Hampir 50% wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengalami penurunan rasio belanja modal dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 terlihat penurunan angka rasio belanja modal pada Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan selisih sebesar 8,34%, namun pada tahun 2023 angka rasio belanja modal di kabupaten ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 13,16%. Selain itu, di tahun 2023 terlihat penurunan drastis rasio belanja modal di Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai selisih 7,98% menunjukkan bahwa angka ini merupakan angka penurunan rasio terbesar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Jika dilihat secara menyeluruh, beberapa daerah menunjukkan peningkatan belanja modal yang signifikan, mencerminkan prioritas pemerintah daerah terhadap investasi infrastruktur dan pengembangan asset tetap. Namun, terdapat pula beberapa daerah yang mengalami penurunan atau variasi tidak menentu, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal, penurunan pendapatan daerah, atau perbedaan prioritas alokasi anggaran. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Misalnya, investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan memperbaiki kualitas hidup. Di sisi lain, pengadaan teknologi dan fasilitas baru dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, belanja modal juga berperan dalam meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur yang memadai akan menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, alokasi belanja modal yang tepat sasaran dan efektif menjadi krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2023 mengalokasikan dana belanja modal sebesar Rp 3.989,34 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ini menunjukkan tren peningkatan yang seharusnya mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, mengembangkan fasilitas publik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Belanja modal mencakup berbagai kegiatan penting, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta gedung fasilitas publik yang bertujuan untuk meningkatkan standar

pembangunan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan anggaran yang cukup besar, diharapkan kualitas infrastruktur di Provinsi Lampung akan meningkat, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada infrastruktur yang memadai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meskipun alokasi belanja modal relatif besar, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur Provinsi Lampung masih memiliki sejumlah masalah yang belum diperbaiki secara memadai. Meskipun dana telah dialokasikan untuk pemeliharaan, banyak jalan yang masih rusak parah. Selain itu, beberapa proyek pembangunan yang seharusnya selesai sesuai jadwal telah ditunda atau bahkan dibatalkan tanpa rencana yang jelas tentang bagaimana proyek-proyek tersebut akan dibangun. Salah satunya, jalan utama yang menghubungkan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami kerusakan yang cukup parah di lebih dari 20 titik, di mana hanya sekitar 60% dari total panjang jalan yang masih dalam kondisi baik, sementara 40% sisanya mengalami kerusakan berat dengan aspal yang telah hancur dan berlubang (CNBC Indonesia).

Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran belanja modal pemerintah daerah digunakan secara tidak efisien. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya perencanaan yang matang, pengawasan yang kurang memadai selama pelaksanaan proyek pembangunan, dan tidak adanya skala prioritas yang jelas untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang harus segera diselesaikan. Masalah ini dapat dikaitkan secara langsung dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, yang saat ini berada di bawah standar, ketika mempertimbangkan kinerja keuangan daerah. Selain itu, salah satu alasan utama terhambatnya realisasi belanja modal yang seharusnya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Tidak hanya itu, ketidakseimbangan dalam perencanaan dan realisasi anggaran belanja modal juga berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian fiskal

daerah, di mana ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat semakin tinggi, sementara kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas.

Dampak dari buruknya pengelolaan belanja modal ini tentu tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat yang menjadi pengguna utama dari infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran tersebut. Jika jalan yang rusak tidak segera diperbaiki, maka akan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengurangi mobilitas masyarakat, dan mempersulit distribusi barang dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, proyek-proyek pembangunan yang tertunda atau tidak selesai dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dana mereka dengan baik. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukannya evaluasi tentang seberapa baik belanja modal mendorong pembangunan daerah dan memastikan bahwa jumlah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif pembangunan. Untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Lampung, pengawasan yang lebih ketat dan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan organisasi-organisasi terkait juga sangat penting.

Penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi Belanja Modal telah ada dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Menurut penelitian Auliya &

Hidayat (2024), Devi *et al.*, (2022) dan Andiyani *et al.*, (2024) rasio pertumbuhan PAD mempengaruhi belanja modal. Menurut penelitian Yanto & Astuti (2020) rasio desentralisasi fiskal mempengaruhi belanja modal. Menurut penelitian Andriyani *et al.*, (2020) rasio efektivitas mempengaruhi belanja modal. Temuan penelitian Devi *et al.*, (2022) dan Andriyani *et al.*, (2020) mengindikasikan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh rasio efisiensi. Selain itu, penelitian Yulietnah & Nur (2021) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat *et al.*, (2024) dan Devi *et al.*, (2022) tidak menemukan adanya pengaruh antara belanja modal dan rasio efektivitas. Lebih lanjut, penelitian Hidayat *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Auliya & Hidayat (2024) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel rasio kemandirian. Rasio kemandirian mencerminkan kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada transfer pusat. Daerah dengan rasio kemandirian tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan belanja modal. Namun, jika sebagian besar PAD digunakan untuk belanja operasional, pengaruhnya terhadap belanja modal bisa terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rasio kemandirian berkontribusi terhadap belanja modal di berbagai daerah. Selain itu pada penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang dan pentingnya penelitian serta hasil pada variabel terkait pada beberapa penelitian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada dasarnya ruang lingkup penelitian ini variabel independent yang di teliti yaitu Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentrifalisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian. Sedangkan variabel dependen yang di teliti pada penelitian ini yaitu Belanja Modal pada tahun 2021-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung?
2. Apakah Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung?
3. Apakah Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung?
4. Apakah Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung?
5. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

4. Membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Akademisi dan Praktisi

Para akademisi dan peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan referensi literatur dan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa di bidang ilmu ekonomi, manajemen publik ataupun keuangan daerah yang mempelajari pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang berisi informasi dalam setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori utama yang berkaitan dengan belanja modal pemerintah daerah yang menjadi kerangka pemikiran dalam

pembahasan masalah, serta memaparkan tentang penelitian terdahulu dan bangunan hipotesis terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan data populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN